

POLITIK PRIMORDIAL DAN POLITIK IDENTITAS DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA

Satryo Pringgo Sejati¹⁾, Ahmad Burhan Hakim²⁾

¹ Universitas Papua, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,
Email : s.sejati@unipa.ac.id ¹⁾, burhanhakim@insud.ac.id ²⁾

Abstract : Indonesia is one of the Muslim countries in the world that is able to gradually implement democracy in its political system. In the 25 years after the reform, Indonesia has tried various schemes to be able to carry out democratization so that it can be accepted by the Indonesian people themselves and even aims to get a positive international image. In the dynamics that occur, the development of political democracy in Indonesia gives rise to a social and political dynamics known as primordial politics and identity politics. These two approaches become true when we look at the conditions and dynamics of politics and democracy that occur in Indonesia. Moreover, the position of the regions has a significant role in contributing to the development of democracy and politics at the center. The region is an interesting area to discuss considering that the region is part of the political administration which has a strong influence on the center. This happened during the Indonesian reformation that occurred in 1998. Where the centralized concept became decentralized with the emergence of regional autonomy. In other words, the region has full power and authority to determine its political and economic direction. Of course, under other conditions it would be better. But on the other hand there are sociological consequences that must be accepted after the reform. The development of democracy in Indonesia actually produces primordial politics and identity politics, which are difficult to avoid. So it could be that Indonesia itself is aware that these two approaches are indeed taking place and cannot be avoided. Therefore, it is necessary for us to understand that primordial politics and identity politics today are a social reality and fact that occur in the dynamics of politics and democracy in Indonesia.

Keywords: *Democracy, Decentralization and Identity Politics*

Abstrak : Indonesia merupakan salah satu negara muslim di dunia yang mampu secara bertahap menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Dalam kurun waktu 25 tahun pasca reformasi Indonesia mencoba dengan berbagai skema untuk bisa melakukan demokratisasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sendiri bahkan bertujuan untuk mendapat citra positif internasional. Dalam dinamika yang terjadi, perkembangan politik demokrasi di Indonesia menimbulkan suatu dinamika sosial dan politik yang disebut sebagai politik primordial dan politik Identitas. Dua pendekatan tersebut menjadi benar adanya ketika kita melihat kondisi dan dinamika politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi posisi wilayah daerah yang punya peranan signifikan dalam kontribusinya untuk pengembangan demokrasi dan politik di pusat. Daerah menjadi suatu wilayah yang menarik untuk dibahas mengingat daerah adalah bagian administrasi politik yang memang punya pengaruh kuat terhadap pusat. Hal ini terjadi pada reformasi Indonesia yang terjadi tahun 1998. Dimana konsep sentralistik menjadi desentralisasi dengan munculnya otonomi daerah. Dengan kata lain, daerah punya kekuatan dan kuasa penuh

untuk menentukan arah politik dan ekonominya. Hal tentu dalam kondisi lain menjadi baik adanya. Namun disisi lain ada konsekuensi sosiologis yang harus ditrima pasca reformasi tersebut. Perkembangan demokrasi di Indonesia secara nyata memproduksi politik primordial dan politik identitas yang hal tersebut sulit untuk dihindari. Sehingga bisa jadi bahwa Indonesia sendiri menyadari bahwa dua pendekatan tersebut memang sedang terjadi dan tidak dapat dihindari. Maka dari perlu kiranya kita memahami bahwa politik primordial dan politik identitas hari ini adalah sebuah realitas dan fakta sosial yang terjadi dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci : *Demokratisasi, Desentralisasi dan Politik Identitas*

A. Pendahuluan

Daerah menjadi salah tempat dimana demokrasi dan perkembangan politik berlangsung. Dinamika politik nasional tentu mampu dan dapat ditentukan oleh kondisi politik lokal atau daerah yang ada. Sehingga pusat dan daerah menjadi salah simbiosis mutualisme dalam perkembangan demokrasi masa kini. Tentu ada cara dan persoalan yang berbeda antara politik daerah dan politik yang terjadi di pusat atau nasional. Bisa jadi terkait wilayah kekuasaan, akses, birokrasi, dinamika masyarakat, pendidikan sampai pada persoalan kompetisi politik yang terjadi di daerah dan pusat (nasional). Hal ini mengindikasikan bahwa memang secara konsep ada perbedaan mendasar antara politik lokal, politik pusat bahkan politik nasional. Walaupun sebenarnya ada benang merah yang mampu dilihat secara kasat mata yakni sistem dan politik yang hampir sama terjadi antara daerah dan pusat.¹

Demokrasi secara konsep dan teori memang dijadikan suatu alat atau tujuan dalam bernegara untuk mencapai kesejahteraan. Dalam kondisi tertentu demokrasi menjadi suatu konsep politik dengan beberapa fakta dan realitas yang ada. Politik primordial dan politik identitas menjadi salah dua beberapa konsekuensi logis atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Politik primordial atau kesukuan, kedaerahan menjadi fakta yang tidak bisa dihindari dalam kontestasi politik yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah. Perkembangan demokrasi hari ini lebih pada persoalan prosedur dengan beberapa fakta berupa tahapan pemilu dan prosesi pemilu yang terjadi di Indonesia. Sedangkan nilai utama demokrasi berupa kebebasan pers, civil society, public servant, hak asasi manusia dan bahkan people power (dalam kondisi tertentu) belum sepenuhnya ada di Indonesia. Hal tentu menjadi sebuah persoalan lain, ditengah isu demokratisasi yang secara internasional menjadi rezim politik yang tidak mampu dihindari oleh banyak Negara. Reformasi yang terjadi pada Mei 1998 menjadi awal pijakan demokrasi di Indonesia, maksudnya bahwa memang sebelumnya sudah ada konsep-konsep demokrasi yang ditawarkan. Namun gejolak proses demokratisasi secara factual mulai terjadi pasca reformasi dan runtuhnya rezim Soeharto yang telah menggurita selama kurang lebih 32 tahun.²

Demokrasi memang mewankan banyak rencana dan agenda tentang kesejahteraan rakyat, hanya fakta lapangan hari ini dengan demokrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Malah yang lebih terlihat adanya proses liberalisasi ekonomi dan sekularisasi politik yang terjadi di Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia masih jauh dari cita-cita reformasi yang ada. Hemat penulis yakni hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Rezim reformasi sudah hampir memasuki tahun ke 25 harusnya hal-hal ideal dalam demokrasi mulai terbentuk. Namun secara nyata indeks korupsi di Indonesia semakin tinggi dan korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di pusat

¹ Haboddin, M. (2015). *Politik primordialisme dalam pemilu di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. Hal 23

² Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik. *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi, 21(2010), 5-30.

bahkan merambah sampai daerah hingga pemerinthan desa. Penulis menganalisis hal ini menjadi suatu resiko dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga hal tersebut seperti tidak bisa dihindari. Penjelasan ini adalah sedikit gambaran mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Kemudian pada persoalan politik identitas dan politik primordial masih menjadi *main issue* dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi wajar terjadi mengingat identitas menjadi suatu hal yang penting di Indonesia. Maksudnya bahwa politik identitas dan politik primordial tersebut menjadi rangkaian nyata dari gejolak dan perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi warna tersendiri dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan bahasa. Sehingga politik primordial dan identitas punya ruang tersendiri dalam dinamika pelaksanaan demokrasi seperti yang dijelaskan di awal. Bukan kemudian bermaksud untuk mengkritisi hal tersebut, namun penulis mencoba memberikan legitimasi faktual atas apa yang terjadi di Indonesia. Contoh sederhana yakni keterwakilan putra daerah yang menjadi mayoritas apabila kita lihat susunan anggota DPRD Kabupaten maupun DPRD provinsi berikut eksekutifnya. Sehingga senyatanya potensi putra dan putri daerah menjadi optimal untuk didaya gunakan. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang terjadi pada masa Orde Baru, dimana banyak dari Kepala Daerah (Bupati, Wali Kota dan Gubernur) tidak dari putra daerah atau diambil secara sentralistik oleh pusat dengan beberapa pertimbangan yang ada termasuk dengan dikotomi Dwi Fungsi ABRI yang terkenal pada masa tersebut.³

Bukan kemudian realitas politik pada masa Orde Baru lebih baik, namun secara pendekatan fakta dan konseptual politik identitas dan primordial tidak banyak terjadi di masa Orde Baru. Tentu konsep pemerintahan yang sentralistik (anti otonomi daerah) dan otoriter menjadikan Orde Baru jauh yang dua fakta tersebut. Dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa ada suatu gejala dan euphoria yang tidak tuntas dalam perkembangan demokrasi masa kini di Indonesia. Sehingga rakyat dan pemerintah seolah menjadi dua faktor yang terpisah, padahal dan konsep Negara kesatuan hal ini menjadi suatu hal yang satu. Namun dengan konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat terkadang menjadi ambigu adanya. Ini menjadi fakta lain yang bisa kita nilai, sehingga sampai hari penulis melihat bahwa rakyat Indonesia lebih banyak menjadi objek politik dari pada subjek politik yang dominan dalam menentukan arah Negara. Pendekatan teori elite politik dan kepentingan golongan menjadi hal utama dalam pusaran dan dinamika politik baik nasional, pusat dan daerah. Maka perlu kemudian secara analitik dicari tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Apakah kemudian memang pemerintah dan elit penguasa menginginkan hal tersebut atau memang rakyat Indonesia masih belum siap untuk menerima konsekuensi logis dari proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia.

Tentu kondisi dan dinamika politik lokal seperti yang dijelaskan sebelumnya mempunyai makna tersendiri. Dimana peran serta masyarakat menjadi penting adanya. Sehingga proses pembentukan civil society menjadi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kondisi lain politik identitas dan politik primordial adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari mana kala berhadapan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang prural dan tidak homogeny seperti di Eropa dan beberapa bagian Negara di ASIA lainnya. Sehingga fakta semacam ini memang harus di urai secara teoritik dan konseptual sehingga gagasan dan ide mengenai fakta demokrasi yang meunculkan politik identitas dan politik primordial menjadi suatu bahasan yang menarik untuk bisa diketahui oleh khalayak ramai. Demikian, persoalan munculnya politik identitas dan politik primordial memang harusnya bisa di hindari namun seperti

³ Santoso, L. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(2), 267-286.

yang dijelaskan beberapa kali bahwa dinamika politik di Indonesia memang sedikit berbeda dan mungkin lebih menarik dari kebanyakan Negara dunia yang menganut sistem demokrasi.

B. Metode

Dalam menganalisis persoalan yang muncul akibat politik identitas dan politik primordial dalam dinamika politik lokal atau daerah, maka metode penelitian kualitatif penulis gunakan untuk mengurai persoalan tersebut. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-ekplanatif sebagai bagian dari metodologi ilmu politik. Ide dan gagasan yang semua bersifat subjektif diusahakan untuk menjadi objektif dengan metode opsional yakni dengan menggunakan teori dan konsep-konsep politik yang perlu digunakan dalam fenomena tersebut. Data yang kami ambil lebih banyak pada data-data sekunder yang penulis ambil dari Internet, majalah, artikel ilmiah, berita online dan lainnya yang penulis anggap representatif. Sehingga metode studi kepustakaan masih penulis gunakan sebagai metode yang penulis anggap masih representative.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Demokrasi dan Politik Lokal

Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial yang terbentuk melalui perjalanan sejarah. Budaya politik lokal tersebut terbentuk dari serangkaian kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial yang berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat. Kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial itulah yang menagaskan pola untuk bertingkah laku masyarakat, mana yang seharusnya dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Batasan-batasan dalam budaya terbut dapat berasal dari agama, adat istiadat ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Budaya politik lokal ini, dapat dilihat pada kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat lokal itu sendiri Perkembangan budaya politik lokal di Indonesia adalah sebagai reaksi adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat supralokal. Dalam hal ini, budaya politik lokal dipengaruhi oleh sistem kultural dan kepercayaan atau agama.⁴ Ia berkembang dalam komunitas-komunitas tradisional yang mempunyai nilai-nilai positif yang patut dikembangkan dan tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan sistem birokrasi lokal di daerah.

Suatu sistem politik juga akan mempengaruhi kebudayaan setiap daerah, juga kan mempengaruhi bagaimana pola birokrasi yang diterapkan dan juga sistem demokrasi juga, Sistem demokrasi lokal adalah cerminan budaya politik suatu daerah, bahkan menjadi aspek terpenting karena sistem birokrasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan politik masyarakat. Budaya demokrasi mempunyai hubungan yang kuat antara budaya politik lokal dikarenakan pertama, birokrasi adalah institusi politik; kedua, budaya demokrasi mempunyai peranan penting dalam upaya memahami elit politik; dan ketiga, keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi setempat yang dijalankan.⁵

Banyak rasa kurang percaya kepada elit politik lokal yang masih menjual isu-isu nilai lokal yang mereka bawa guna mendapatkan simpati warga lokal, terutama di beberapa daerah yang masih kuat unsur-unsur kultural yang masih kental di tengah masyarakat. Beberapa masyarakat Palembang beranggapan nilai lokal bisa sangat berpengaruh dalam suatu sistem politik masyarakat, terutama bagaimana ketika mereka dimanfaatkan hanya pada saat-saat tertentu dan setelah itu mereka akan

⁴ Syamsudin Haris, (1994). *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta:LP3E, hal. 67-69

⁵ Fikri, S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2), 167-181.

dilupakan seiring tumbuhnya kekuasaan yang telah dimiliki oleh kontestan pemilu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bagaimana nilai lokal/ kearifan lokal sangat memungkinkan bagaimana perubahan suatu sistem politik lokal juga, dan dampak yang lebih besar juga akan mempengaruhi sistem birokrasi yang ada dalam suatu daerah. Sehingga tidak bisa dipungkiri dan dihindarkan ketika budaya birokrasi dan budaya politik setiap daerah berbeda tergantung perkembangan budaya politik itu sendiri di setiap daerah.⁶

Dengan keyakinan bahwa perubahan mendasar hanya akan terjadi kalau dimulai dari “desa/kampung” maka posisi dan peran masyarakat adat – penduduk pedesaan lainnya menjadi sangat penting, antara lain dengan terus-menerus membangun otonomi asli yang berakar pada budaya politik lokal dan kearifan adat. Menerapkan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat komunitas. Menumbuhkan-suburkan keberanian politik pemimpin-pemimpin lokal “merebut” hak politik komunitas adatnya untuk membangun kesepakatan-kesepakatan bersama di kalangan Masyarakat Adat yang terkait dengan “posisi Masyarakat Adat terhadap negara, modal dan nilai-nilai baru”. Dari kepemimpinan politik tingkat komunitas inilah Masyarakat Adat kemudian memperkuat dirinya memimpin perubahan pada tingkat yang lebih luas tingkat kabupaten, baru kemudian memasuki arena advokasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional.⁷

Persatuan dan kesatuan akan mudah tercapai bila masyarakat sudah pada taraf yang sejahtera, kemakmuran akan membuat masyarakat lebih tenang dalam menjalankan semua kehidupannya. Jalan yang paling tepat adalah membuat masyarakat berdaulat, berdaulat dalam berbagai hal, termasuk berdaulat dalam mengekspresikan pola pikirnya. Kedaulatan maksudnya memberikan kebebasan namun tetap berada dalam kaidah-kaidah yang telah diatur oleh Undang-undang, karena selama ini pengalaman yang diambil ketika masyarakat dikebiri kebebasannya, masyarakat di pasung dalam melakukan berbagai hal, efeknya akan berlanjut panjang dan akan menyimpan bara dalam sekam, yang lama kelamaan akan memberikan dampak yang sangat besar dan tidak dapat diprediksi kapan akan meledak. Era orde baru merupakan contoh yang paling mudah untuk dikemukakan, rezim otoriter memegang kendali dari struktur paling tinggi hingga paling rendah, cengkraman otoritas yang dilakukan akhirnya membuat ingin bergerak tetapi tidak bisa.⁸

2. Masyarakat Pluralis dalam Konteks Politik Identitas

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional di Wina pada 1994.⁹ Pertemuan tersebut menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktek politik identitas dan menjadikannya

⁶ Ubed, Abdilah, . (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas. Magelang: Indonesia Tera. hal.35-37

⁷ Chris, Barker, . 2000. Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Publication Ltd/. hal.55-56

⁸ Buchari, Sri Astuti. 2014. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Obor Indonesia. hal.35-36

⁹ Simposium ini diadakan oleh European Centre for Social Welfare Policy dan Dr. Karl Renner Institute, serta disponsori oleh Jewish Museum of Vienna, dan Department of Scientific Affairs. Hasil simposium tersebut dibukukan dalam bentuk antologi yang dieditori oleh Agnes Heller dan Sonja Puntischer Riekman dengan judul Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature, (Brookfield: Avebury, 1996).

sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (grand narrative), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (freedom), toleransi dan kebebasan bermain (free play), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (race thinking), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru intoleransi, praktek-praktek kekerasan pun muncul.¹⁰

Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L. Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat manipulasi untuk menggagalkan politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun pada bagian yang lain, argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa: Dalam politik identitas tentusaja ikatan kesukuan mendapat Peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.¹¹

Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali "narasi besar" yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya; Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus. Sebagai contoh, dalam kontestasi pilkada DKI terjadi sentimen politik identitas yang sangat kuat, dimana pribumi mengkhususkan diri dan menolak non-pribumi, hal ini terkait dengan ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain.

Filsafat demokrasi "dari rakyat" jika diletakkan dalam sistem politik Easton maka masuk dalam kategori "input", dan implementasinya akan melahirkan konsep partisipasi dan keterwakilan. Partisipasi adalah persoalan hubungan kekuasaan, atau hubungan ekonomi-politik, yang dianjurkan oleh demokrasi. Partisipasi rakyat berada dalam konteks hubungan antara negara (pemerintah) dan rakyat (masyarakat). Negara adalah pusat kekuasaan, kedaulatan dan serangkaian hukum yang mengatur peredaran barang-barang publik di masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri terdapat hak sipil dan hal politik, kekuatan kelompok, kebutuhan hidup dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik melahirkan kesejahteraan manusia (human well being).¹²

Memahami demokrasi lokal memang tak dapat memisahkan diri dari perbincangan tentang kebijakan desentralisasi. Mengingat kebijakan ini merupakan pintu awal bagi terciptanya demokrasi lokal. Bahkan sejumlah ilmuwan meyakini bahwa tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi tidak lain adalah menumbuhkan demokrasi lokal.¹³ Dalam konteks ini salah satu bentuk kebijakan

¹⁰ Heller, Agnes dan Punsher, Sonja. 1995. Biopolitical Ideologies and their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies. Oxford, Blackwell. Hal.66-67

¹¹ Habibi, M. (2018). Analisis politik identitas di Indonesia.

¹² Suyatno (2011). Dinamika Demokrasi Tempatan di Indonesia: Kajian Demokrasi Tempatan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jembrana, Bali, Tesis PhD Universiti Sains Malaysia. Hal 43-45

¹³ Brian C. Smith, Decentralization: Territory Dimension of the State (London: MacMillan, 1985);

desentralisasi yang sangat penting bagi kelangsungan demokrasi lokal adalah devolusi, yakni transfer kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan sumberdaya dari negara ke pemerintah lokal. Devolusi juga sering disebut dengan desentralisasi demokratis (democratic decentralization), yakni sebagai bentuk pengembangan hubungan sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat. Desentralisasi demokratis hendak mengelola kekuasaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, perluasan proses demokrasi pada level pemerintahan lokal, dan mengembangkan standar (ukuran) yang menjamin bahwa demokrasi berlangsung secara berkelanjutan (Manor, 1997).¹⁴ Adapun kebijakan desentralisasi yang lain adalah dekosentrasi, yang mengacu pada penggeseran pembuatan keputusan (decisionmaking) dalam negara, dan delegasi tugastugas tertentu sementara pemerintah pusat masih menguasai tanggung jawab keseluruhan. Sementara itu privatisasi adalah merupakan bentuk desentralisasi yang paling jauh jangkauannya.

3. Primordialisme Sebagai Bagian Dari Demokrasi

Dinamika perpolitikan khususnya menjelang pemilu, merupakan kajian yang menarik dan mengundang perhatian banyak pengamat baik ahli politik, maupun warga biasa. Interaksi antar warga, warga dengan pemerintah, dan antara pemerintah dengan institusi-institusi di luar pemerintah, menambah kekayaan khazanah perpolitikan di Indonesia. Berbagai perilaku politik menjadi sorotan, perilaku-perilaku khas yang berulang dapat dikategorikan sebagai budaya politik yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Istilah budaya politik meliputi legitimasi, pembagian kekuasaan, proses kebijakan pemerintah, partai politik, aparatur negara, serta dinamika masyarakat terhadap pemerintah. Politik juga memasuki ranah agama, ekonomi dan sosial, bahkan kehidupan pribadi dan sosial secara luas.¹⁵

Budaya politik mengandung sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat dan melekat pada masyarakat itu sendiri, sehingga setiap unsur masyarakat yang berbeda akan berbeda pula budaya politiknya, semisal budaya politik pada masyarakat umum dengan para elitnya. Sebagaimana dikatakan Budiardjo “Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistim politik, yaitu sikap-sikap, sistim-sistim kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi didalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.”. Secara sederhana budaya politik merupakan orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.¹⁶

Primordialisme adalah paham kesukuan yang amat kuat, sehingga banyak para ahli politik memandang kekuasaan yang bercirikan primordialisme adalah politik dengan pola tradisional. Primordialisme suku, primordialisme agama dan primordialisme kedaerahan, menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi elektabilitas pasangan calon. Jika seorang calon

Dennis Rondinelli, "What is Decentralization?" Note prepared for the PREM Knowledge Management System, World Bank, Washington, DC, 1998; dan Larry Diamond, *Developing Democracy* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999) hal.23-25

¹⁴ Manor, J., & World Bank. (1999). *The political economy of democratic decentralization*. Hal. 52-53

¹⁵ Abdullah, T. (2010). Refleksi selintas tentang primordialisme, pluralisme, dan demokrasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2), 181-208.

¹⁶ Samuel H. Beer dan Adam B. Ulam (eds.), *Patterns of Government* (New York;Random House, 1967), h. 25 -31, dan Gilbert Abcarian dan George s. Masannat: *Contemporary Political system* (New York, Charles Scriber's Sons, 1970), h.11. Ibid, h.49.

memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi daya kohesifitas masyarakat dengan calon presidennya yang sekaligus menjadi tenaga pendorong mencapai tujuan. Hal tersebut tetap lazim dalam demokrasi, karena demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dan keyakinan politik yang dipegangnya, termasuk politik aliran untuk partisipasi dalam membentuk Negara.¹⁷

Para ilmuwan politik mengungkapkan demokrasi sebagai cara paling ideal dimana rakyat biasa bisa membentuk pemerintahannya seperti yang di ungkap oleh Winarno dalam bukunya; “Suatu negara dikatakan demokratis atau menganut sistem demokrasi jika rakyat mempunyai kesempatan secara bebas membentuk pemerintahan dan memilih wakil-wakil mereka dalam suatu rentang waktu yang ajeg (regular).¹⁸

Dalam konteks transisi menuju demokrasi secara teoritis terdapat beberapa sudut pandang yang menjelaskan fenomena bangkitnya identitas primordial. Pada umumnya kebangkitan sentimen primordial dilihat sebagai gejala yang terkait dengan persoalan tidak terakomodirnya keterwakilan kepentingan kelompok masyarakat tertentu baik dalam bidang ekonomi politik sosial maupun budaya. Di sisi lain fenomena ini juga dipicu oleh menguatnya rasa ketidakpastian akibat perubahan rezim yang berkuasa. Sementara itu faktor globalisasi juga tidak dapat diabaikan. Perannya relatif paradoks sebagai komponen yang memberikan kesadaran baru akan makna keadilan, diskriminasi, dan kekhasan hingga sebagaimana yang diyakini oleh Rankin dan Goonawardena yaitu turut bertanggung jawab atas meluasnya kesenjangan ekonomi dan praktik diskriminasi politik dan budaya.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa terdapat variabel antara di antara hubungan demokratisasi dan kebangkitan sentimen primordial di mana demokratisasi sejatinya merupakan pemicu yang mengondisikan terjadinya penguatan sentimen primordial yang sebelumnya telah dimatangkan oleh persoalan kesenjangan ekonomi, ketidaksiapan mengantisipasi perubahan institusional yang berjalan cepat, dan dampak dari represi politik dari rezim sebelumnya.²⁰

Meskipun kecenderungan di atas memperlihatkan sebuah optimisme namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia telah sampai pada tahap aman dalam konteks mempertahankan eksistensi kebangsaannya. Karena kebangsaan itu sejatinya tidak saja merupakan sebuah produk zaman yang perlu terus dibina keabsahannya di setiap masa, namun juga karena beberapa potensi disintegrasi yang dapat menyebabkan runtuhnya bangsa tidak seutuhnya hilang. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah upaya institusional dan upaya kultural dalam bentuk kesadaran untuk menjawab situasi tersebut di era reformasi ini.²¹

¹⁷ Op.Cit Abdullah, T. (2010). Refleksi selintas tentang primordialisme, pluralisme, dan demokrasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2), 181-208.

¹⁸ Budi Winarno, 2007, *Globalisasi dan krisis demokrasi*, Yogyakarta, Med Press. h.48.

¹⁹ Noorl, F. (2004). Nasionalisme Demokratisasi Dan Sentimen Primordialisme Di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan Versus Keindonesiaan. *Southeast Asia*, 26(3).

²⁰ Ghosal Baladas 2004 *Democratic Transition and Political Development in Post Soeharto Indonesia* Contemporary Southeast Asia 26 No.3 hal.30

²¹ Op.cit Noorl, F. (2004). Nasionalisme Demokratisasi Dan Sentimen Primordialisme Di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan Versus Keindonesiaan. *Southeast Asia*, 26(3).

4. Kesimpulan

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia pada dasar tetap menilik pada perkembangan demokrasi yang ada di daerah. Sehingga runtutan gejala demokrasi di Indonesia tidak hanya secara Top-down dari pusat ke daerah. Tapi juga bisa sebaliknya dengan konsep bottom-up. Ini merupakan kondisi sosio-politik yang terjadi di Indonesia. Dimana daerah punya peranan kuat dalam menentukan dinamika politik yang terjadi pusat. Mengingat reformasi bergulir dan memunculkan konsep otonomi daerah yang sampai hari ini kita tahu. Politik primordial dan politik identitas menjadi suguhan nyata dan epic dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sesungguhnya secara konseptual dan teori memang bisa diamini bahwa peran daerah hari ini cukup signifikan baik secara ekonomi, politik dan sosial.

Dalam dimensi tertentu, perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari peran daerah atau lokal seperti yang penulis jelaskan di awal. Daerah mempunyai spectrum yang kuat untuk bisa mewarnai dinamika politik nasional. Semisal dinamika politik yang terjadi di 5 provinsi di Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Yogyakarta dan Banten) punya pengaruh kuat terhadap dinamika politik nasional apalagi kalau terjadi proses event demokrasi semisal pilpres dan pileg. Walaupun hal tersebut sulit untuk ditemukan padanan konseptualnya namun secara harfiah kita bisa melihat hal tersebut.

Kemudian apabila kita menilik lebih jauh, masyarakat Indonesia terdiri dari mayoritas suku Jawa yang kemudian tidak hanya tinggal di wilayah Jawa itu sendiri, melainkan menyebar ke banyak pulau-pulau besar di Indonesia. Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai Papua hampir banyak orang Jawa yang hidup dan tinggal menetap disana. Beberapa kepala daerah atau pun anggota dewan yang ada di daerah tersebut juga masih keturunan Jawa. Dengan kata bahwa politik primordial dan politik identitas di Indonesia masih sangat kental. Apalagi kalau kita sedikit singgung tentang agama, tentu mayoritas pemimpin di Indonesia adalah orang Islam atau Muslim. Ini dampak dari skema mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan menjadi yang terbesar di dunia. Tentu bagi penulis demokrasi di Indonesia tidak secara buta di aplikasikan dalam bentuk prosedur demokrasi. Melainkan ada pengembangan dan konsekuensi sosial-politik berupa politik primordial dan politik identitas.

5. Daftar Kepustakaan

- Abdullah, T. (2010). Refleksi selintas tentang primordialisme, pluralisme, dan demokrasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2),
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik. *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi, 21(2010),
- Brian C. Smith, *Decentralization: Territory Dimension of the State* (London: MacMillan, 1985);
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Obor Indonesia. hal.35-36
- Budi Winarno, 2007, *Globalisasi dan krisis demokrasi*, Yogyakarta, Med Press.
- Chris, Barker, . 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publication Ltd/. hal.55-56
- Dennis Rondinelli, "What is Decentralization?" Note prepared for the PREM Knowledge Management
- Fikri, S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2),
- Ghosal Baladas 2004 *Democratic Transition and Political Development in Post Soeharto*

- Gilbert Abcarian dan George S. Masannat: Contemporary Political system (New York, Charles Scriber's Sons, 1970), h.11. Ibid,
- Habibi, M. (2018). Analisis politik identitas di Indonesia.
- Haboddin, M. (2015). *Politik primordialisme dalam pemilu di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Heller, Agnes dan Punsher, Sonja. 1995. Biopolitical Ideologies an their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies. Oxford, Blackwell.
- Indonesia Contemporary Southeast Asia 26 No.3 Jakarta:LP3E, London: The Johns Hopkins University Press, 1999) hal.
- Manor, J., & World Bank. (1999). The political economy of democratic decentralization. Hal. 52-53
- Noorl, F. (2004). Nasionalisme Demokratisasi Dan Sentimen Primordialisme Di Indonesia Problematika Identitas Keetnisan Versus Keindonesiaan. *Southeast Asia*, 26(3).
- Samuel H. Beer dan Adam B. Ulam (eds.), Patterns of Government (New York; Random House, 1967), h. 25 -31, dan
- Santoso, L. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(2),
- Simposium ini diadakan oleh European Centre for Social Welfare Policy dan Dr. Karl Renner Institute, serta disponsori oleh Jewish Museum of Vienna, dan Department of Scientific Affairs. Hasil simposium tersebut dibukukan dalam bentuk antologi yang dieditori oleh Agnes Heller dan Sonja Puntsher Riekmann dengan judul Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature, (Brookfield: Avebury, 1996).
- Suyatno (2011). Dinamika Demokrasi Tempatan di Indonesia: Kajian Demokrasi Tempatan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jembrana, Bali, Tesis PhD Universiti Sains Malaysia.
- Syamsudin Haris, (1994). Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman. System, World Bank, Washington, DC, 1998; dan Larry Diamond, Developing Democracy (Baltimore and
- Ubed, Abdilah, . (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas. Magelang: Indonesia Tera.